



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 1 / 1 / 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bintan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Pembentukan Peraturan Bupati Bintan Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar rencana Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Daftar Rencana Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR 3/3/2024  
 TENTANG  
 RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN  
 BUPATI BINTAN TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BINTAN TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL	PELAKSANAAN
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Januari
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha			
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu			
Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.			
Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atau Notaris Dan Pejabat Pelayanan Lelang Negara			
Pemeriksaan Pajak Daerah.			

		Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.	
		Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.	
2	DINAS PERHUBUNGAN KAB BINTAN	Pembentukan Uptd Pengelolaan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.	MARET
		Pembentukan Uptd Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	APRIL
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	
		Pedoman Dana Darurat Bencana Kabupaten Bintan	
		Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	
		Rencana Penanggulangan Bencana	
		Pemeriksaan Pengujian Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran Dan Sarana Penyelamatan	
4	DINAS SOSIAL	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia	
		Orang Terlantar	
5	DPUPRP	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kijang Tahun 2023-2043	JANUARI
6	DKPP	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pangan Dan Pertanian Di Kabupaten Bintan	
7	DKUPP	UPTD PLUT-KUMKM Kabupaten Bintan	
8	DINAS KESEHATAN	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan	JANUARI
		Eliminasi Malaria Kabupaten Bintan Tahun 2024	FEBRUARI
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bintan	APRIL
		Petunjuk Pelaksanaan Pemberian hibah kepada masyarakat bidang pangan dan pertanian di kabupaten bintan	
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	MARET
		Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito	MARET

		Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023	JULI
		Pedoman Standar Harga Satuan	JULI
		Analisis Standar Berlanja	JULI
		Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	OKTOBER
		Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	DESEMBER
11	BAPELITBANG	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Tahun 2025	JULI
		Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	AGUSTUS
		Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Tahun 2024	AGUSTUS
		Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	SEPTEMBER
		Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025	OKTOBER
12	DPMPTSP	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan	JANUARI
		Peraturan Bupati Tentang Insentif Dan Kemudahan Investasi Kabupaten Bintan	
		Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bintan (Rupmk)	
13	DINAS PERKIM	Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilias Umum Perumahan	DESEMBER
		Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Rp2kpkpk) Kabupaten Bintan	DESEMBER
		Petujuk Pelaksanaan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Bintan	DESEMBER
14	KESBANGPOL	Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	MEI
15	INSPEKTORAT	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	JANUARI
16	DINAS PENDIDIKAN	Alat Tulis Siswa Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar	JANUARI

		Petunjuk Teknis Penyediaan Transportasi Gratis Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasa	JANUARI
		Pengangkatan Dan Pemberhentian Honorer Insentif	JANUARI
		Kurikulum Muatan Lokal	FEBRUARI
		Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah Dan Pengawas	APRIL
		Pembentukan Uld (Unit Layanan Disabilitas) Kabupaten Bintan	MEI
17	DPAD	Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten	JANUARI
		Kode Kllasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, Dan System Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	JANUARI
		Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	JANUARI
		Kode Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	JANUARI
		Alih Media Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	JANUARI
18	DINAS PERIKANAN	Penggunaan Aplikasi Si Ikan Dalam Pendataan Pelaku Usaha Perikanan Secara Digital	AGUSTUS
19	DPMD	Penyusunan Apbdes	FEBRUARI
		Pengelolaan Aset Desa	APRIL
		Pengadaan Tanah Kas Desa	APRIL
		Pengelolaan Keuangan Secara Non Tunai	APRIL
20	BKPSDM	Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Dan Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JANUARI
		Penerapan Hari Dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JANUARI
		Mutasi Pegawai Negeri Sipil	FEBRUARI
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	MEI
22	SEKRETARIAT DAERAH	Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026	MARET
		Standar Pelayanan Minimum Blud UPTD Puskesmas	JANUARI

Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JUNI
Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JUNI
Standar Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JUNI
Standar Kompetensi Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	JUNI
Standar Kompetensi Pengawas Di Lingkungan Pemkab Bintan	JUNI
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kab. Bintan	JUNI
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	AGUSTUS
Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Identifikasi Transportasi Tertentu Untuk Pengguna Jenis Bbm Tertentu Dan Jenis Bbm Khusus Penugasan	
Perubahan Perbu No 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana, Pengawasan Pendistribusian Liquidified Petroleum Gas Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan	
Pola Tata Kelola Blud Uptd Puskesmas	
Barang Dan Jasa Blud Puskesmas	
Kebijakan Akuntansi Blud Uptd Puskesmas	
Pedoman Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemkab Bintan	
Remunerasi pada Blud Uptd Rsud	
Pengadaan Persyaratan Pengangkatan Penempatan Batas Usia Masa Kerja Hak Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional	
Renstra Pada Blud Uptd Puskesmas	
Penyusunan Pengajuan Penetapan Perubahan Rba Blud Blud Uptd Puskesmas	

	Penatausahaan Keuangan Blud UPTD PUSKESMAS	
	Tarif Layanan Blud UPTD PUSKESMAS	
	Tata Cara Penghapusan Utang BLUD UPTD PUSKESMAS	
	Mekanisme Pengajuan Utang/ Pinjaman Jangka Pendek Pada BLUD UPTD PUSKESMAS	
	Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain	
	Pengelolaan Investasi BLUD	
	Pembinaan Dan Pengawasan Blud	


 'BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN